

**POLITIK HUKUM PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI INDONESIA**

**DESERTASI**



**UIN IMAM BONJOL  
PADANG**

**Oleh:**

**Fahmi. R**

**NIM: 2220100012**

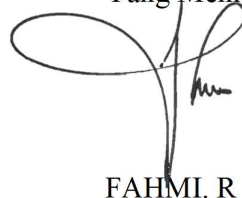
**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM  
BONJOL PADANG 2025 M / 1447 H**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui, dalam disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar dalam keserjanaan di suatu perguruan tinggi. Kemudian Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 5 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and a series of smaller, connected strokes on the right, ending in a small horizontal flourish.

FAHMI. R

## HALAMAN PENGESAHAN

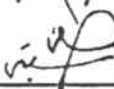
Naskah Disertasi ini berjudul "**Politik Hukum Pemotongan Gaji Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia**" yang disusun oleh Fahmi. R NIM 2220100012 Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, yang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Terbuka.

Disahkan di : Padang  
Tanggal : 4 September 2025  
Tim Penguji Sidang Terbuka.

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.  
Penguji I



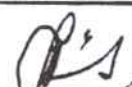
Prof. Dr. Elfia, M.Ag.  
Penguji II



Prof. Dr. Zainudin, M.Ag.  
Penguji III



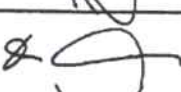
Prof. Dr. Mukhlis Bahar, Lc., M.Ag.  
Penguji VI



Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag.  
Penguji V



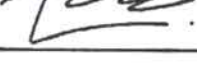
Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.



Penguji VI



Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.  
Penguji VII



Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, keluarga penulis dan seluruh pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala disisinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Utusan Allah SWT sebagai Pembawa risalah kebenaran (al-Quran al-Karim) yang dijamin kesempurnaannya dan keautentikannya sampai akhir zaman. Penulis menyadari, dengan segala kekurangan dan keterbatas yang terdapat pada diri penulis, proses penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Bantuan dan dukungan oleh banyak pihak pada banyak aspek, baik secara langsung ataupun tidak langsung merupakan kenikmatan yang patut penulis syukuri, karena tanpa itu, proses penulisan disertasi ini akan menemukan banyak hambatan dan kesulitan yang berarti. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk merefleksikan rasa syukur dan ucapan terimakasih tersebut secara mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan; Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kepegawaian; Dr. Testru Hendra, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama; Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si., Ph.D. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan; H. Muhammad Fuad Nasar, M.Sc. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama; H. Hendri, S.Ag., M.Pd.
2. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Imam Bonjol; Dr. Sarwan, M.A., Ph.D. Ketua Prodi S3 Hukum Islam; Prof. Dr. Elfia, M.Ag.

3. Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D., dan Dr. Khairul Fahmi, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan pencerahan dan pengayaan yang luar biasa terhadap disertasi penulis.
4. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag, Prof. Dr. Makmur Syarif, SH, M.Ag., Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A. Prof. Nurus Shalihin, M.Si.,Ph.D, Prof Dr. Zainudin, M.Ag, Prof. Dr. Salma, M.Ag., Prof. Dr. Asasriwarni, M.H., Prof. Dr. Yaswirman, MA, Prof. Dr. Elfia, M.Ag, Prof. Dr. Ikhwan, M.Ag, Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag, Dr. Zainal Azwar, M.Ag dan Dr.Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum selaku dosen pengampu perkuliahan S3 Hukum Islam.
5. YM. Ketua Mahkamah Agung RI, seluruh pejabat dan staf Mahkamah Agung RI; Pejabat dan staf pada Dirjend Badilag MARI; Keluarga Besar PTA. Palembang; Keluarga Besar PTA Padang; Keluarga Besar PTA Semarang; Keluarga Besar Pengadilan Agama Lubuklinggau; Keluarga Besar Pengadilan Agama Bukittinggi; dan Keluarga Besar Pengadilan Agama Pematang Kelas IA.
6. Kedua orang tua penulis yaitu H. Suhaimi Rj. Bujang dan Hj. Fatimah Usman. Kedua orang mertua penulis Drs. H. Emsofi Nurdi dan Hj. Riferni, BA dengan segala pengorbanan dan kasih sayangnya yang telah memberikan penulis indahnya kehidupan, kepemilikan ilmu dan pengetahuan yang berguna, baik bagi diri penulis sendiri, keluarga, sanak saudara, rekan, maupun bagi masyarakat secara umum. Begitu juga kepada Kakak penulis Marfit Helmi dan Yen Rustam, H. Firdaus. S, M.Pd.I., Hj. Maria Ulfah M.Pd.I.
7. Pendamping hidup penulis yaitu Hj. Efrinela, ST dengan segala dukungan, kesabaran dan penerimaannya kepada penulis untuk menjalani proses belajar, berdiskusi dan memproyeksikannya dalam banyak hal. Terkasih dan tersayang, Rais Halim Hidayatullah, Siti Maulida Mardhatillah, dan Muhammad Al Fatih Habiburrahman yang menjadikan penulis sebagai orang tua yang tak hentinya mengucapkan puji dan syukur serta dicintai dan mencintai pada setiap proses tumbuh kembangnya dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

8. Teman-teman rekan seperjuangan mahasiswa S3 Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, September 2025

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop on the left and a series of smaller, connected loops on the right.

FAHMI.R

NIM. 2220100012

### **Abstrak**

Studi ini menjelaskan bagaimana politik hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia tentang aturan pembagian sebagian gaji PNS untuk bekas istri pasca perceraian sampai bekas istri menikah lagi. Penelitian menggunakan metode pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*). Cara yang dilakukan adalah pertama, menganalisis Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Kedua, menganalisis putusan-putusan hakim pengadilan agama tentang penerapan pemotongan sebagian gaji PNS untuk bekas istri, dan ketiga, menganalisis hasil penelitian terdahulu dan hasil form group discussion yang telah dilakukan terkait dengan Pasal 8 PP 10 Tahun 1983. Pendekatan dalam studi ini menggunakan teori politik hukum dalam kebijakan pemerintah membentuk aturan Pasal 8 PP 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990. Hasil penelitian, politik hukum pembentukan Pasal 8 adalah cara pemerintah agar PNS memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, dan menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Kedua, cara pemerintah mengurangi angka perceraian dengan mempersulit perceraian. Ketiga, cara pemerintah untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan memberikan perlindungan kepada bekas istri dan anak agar terjaminnya kehidupan bekas istri dan anak pasca perceraian. Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan kebijakan hukum Pemerintah Indonesia sebagai tindakan preventif (*Sadd az-Zari'ah*) dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Pembagian sebagian gaji kepada bekas istri sampai bekas istri menikah lagi bukan menyangkut masalah keadilan tetapi cara pemerintah melindungi dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Kata Kunci Politik Hukum, Nafkah. Pembagian Gaji PNS

### **Abstract**

This study explains the legal policy employed by the Indonesian government regarding the regulation on distributing a portion of a civil servant's salary to an ex-wife after divorce, until the ex-wife remarries. The study employed a library research method with a normative legal approach through a statute approach. The method used was to first analyze Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1999 and related laws and regulations. Second, analyzing the decisions of religious court judges regarding the application of partial deductions from civil servant salaries for ex-wives. And third, analyzing the results of previous research and the results of group discussions conducted regarding Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983. This study's approach utilizes legal political theory in government policy to establish Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990. The research findings indicate that the legal policy of establishing Article 8 is a government strategy for civil servants to set a good example for their subordinates and serve as role models for society, including in managing family life. Second, analyzing the government's strategy to reduce the divorce rate by making divorce more difficult. Third, the government's approach to maintaining family unity and providing protection to ex-wives and children to ensure their well-being after divorce. Article 8 of Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990, constitutes the Indonesian government's legal policy as a preventive measure (*Sadd az-Zari'ah*) to maintain household unity. Distributing a portion of the salary to the ex-wife until she remarries is not a matter of justice but rather a government measure to protect and maintain the integrity of the household.

**Keywords:** Legal Politics, Livelihood, Distribution of Civil Servant Salaries

### خلاصة

تشرح هذه الدراسة السياسة القانونية التي تنتهجها الحكومة الإندونيسية بشأن تنظيم توزيع جزء من راتب الموظف الحكومي على الزوجة السابقة بعد الطلاق حتى تتزوج الزوجة السابقة مرة أخرى. اعتمدت الدراسة على منهج بحث مكتبي، ومنهج قانوني معياري، من خلال منهج تشريعي. وتمثل المنهج المستخدم في: أولاً، تحليل المادة ٨ من اللائحة الحكومية رقم ١٠ لعام ١٩٨٣، بالتزامن مع اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لعام ١٩٩٩ والقوانين واللوائح ذات الصلة. ثانياً، تحليل قرارات قضاة المحاكم الشرعية بشأن تطبيق الاستقطاعات الجزئية من رواتب الموظفين الحكوميين على الزوجات السابقات. وثالثاً، تحليل نتائج البحوث السابقة ونتائج المناقشات الجماعية التي أجريت بشأن المادة ٨ من اللائحة الحكومية رقم ١٠ لعام ١٩٨٣. يستخدم نهج هذه الدراسة النظرية السياسية القانونية في السياسة الحكومية لإرساء المادة ٨ من اللائحة الحكومية رقم ١٠ لعام ١٩٨٣ بالتزامن مع اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لعام ١٩٩٠. تشير نتائج البحث إلى أن السياسة القانونية لإرساء المادة ٨ هي استراتيجية حكومية لموظفي الخدمة المدنية ليكونوا قدوة حسنة لمروسيهم ويكونوا قدوة للمجتمع، بما في ذلك في إدارة الحياة الأسرية. ثانياً، تحليل استراتيجية الحكومة للحد من معدل الطلاق عن طريق جعل الطلاق أكثر صعوبة. ثالثاً، نهج الحكومة في الحفاظ على وحدة الأسرة وتوفير الحماية للزوجات السابقات والأطفال لضمان رفاهتهم بعد الطلاق. تشكل المادة ٨ من اللائحة الحكومية رقم ١٠ لعام ١٩٨٣ بالتزامن مع اللائحة الحكومية رقم ٤٥ لعام ١٩٩٠ السياسة القانونية للحكومة الإندونيسية كإجراء وقائي (سد الذريعة) للحفاظ على وحدة الأسرة. إن توزيع جزء من الراتب على الزوجة السابقة حتى تتزوج ثانية ليس عدلاً، بل هو إجراء حكومي لحماية الأسرة والحفاظ على سلامتها.

الكلمات المفتاحية: السياسة القانونية، سبل العيش، توزيع رواتب موظفي الخدمة المدنية

## DAFTAR ISI

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS                                                              | 2  |
| PERSETUJUAN PROMOTOR                                                                         | 3  |
| HALAMAN PENGESAHAN                                                                           | 4  |
| KATA PENGANTAR                                                                               | 5  |
| Abstrak.....                                                                                 | 8  |
| Abstract.....                                                                                | 9  |
| خلاصة.....                                                                                   | 10 |
| DAFTAR ISI                                                                                   | 11 |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                                      | 13 |
| 1.1. Latar Belakang .....                                                                    | 13 |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                                   | 17 |
| 1.3. Batasan Masalah/ Pertanyaan penelitian .....                                            | 17 |
| 1.4. Tujuan Penelitian.....                                                                  | 17 |
| 1.5. Manfaat Penelitian.....                                                                 | 18 |
| BAB II TEORI DAN LITERATUR RIVIEU                                                            | 19 |
| 2.1. Kerangka Teori .....                                                                    | 19 |
| 2.1.1. Politik Hukum Islam.....                                                              | 33 |
| 2.1.2. Nafkah Istri Pasca Perceraian .....                                                   | 35 |
| 2.2. Literatur Riview .....                                                                  | 45 |
| BAB III METODE PENELITIAN                                                                    | 57 |
| 3.1. Setting Penelitian .....                                                                | 57 |
| 3.2. Bentuk Penelitian .....                                                                 | 59 |
| 3.3. Jenis Data .....                                                                        | 59 |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data .....                                                           | 59 |
| 3.5. Langkah-langkah Pengumpulan Data .....                                                  | 61 |
| 3.6. Teknik Analisis Data .....                                                              | 62 |
| BAB IV REGULASI PEMBAGIAN SEBAGIAN GAJI PNS PRIA PASCA<br>PERCERAIAN UNTUK BEKAS ISTRI ..... | 64 |
| 4.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil .....                                                   | 64 |
| 4.2. Kewajiban Menyerahkan Sebagian Gaji Untuk Mantan Istri .....                            | 67 |

|                                                                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.3. Pelanggaran Terhadap Aturan Penyerahan Sebagian Gaji Merupakan Pelanggaran Yang Diberikan Sanksi Dengan Hukuman Disiplin Berat .....           | 70         |
| 4.4. Petunjuk Teknis Tentang Rincian Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil Pria Pasca Perceraian dan Cara Pemotongan Gajinya.....                     | 71         |
| 4.5. Kewenangan Pelaksanaan Pemotongan Gaji Pegawai Negeri Sipil Pria Untuk Bekas Istri .....                                                       | 74         |
| 4.6. Pelaksanaan Aturan Pembagian Sebagian Gaji Suami Untuk Bekas Istri di Pengadilan Agama .....                                                   | 82         |
| <b>BAB V FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI TERBITNYA ATURAN PEMBAGIAN SEBAGIAN GAJI PNS UNTUK BEKAS ISTRI.....</b>                                       | <b>89</b>  |
| 5.1. Faktor Sosiologis .....                                                                                                                        | 89         |
| 5.2. Faktor Filosofis .....                                                                                                                         | 101        |
| 5.3. Faktor Yuridis .....                                                                                                                           | 117        |
| <b>BAB VI IMPLIKASI PEMOTONGAN SEBAGIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP MANTAN SUAMI, MANTAN ISTRI DAN PENERAPANNYA DI PENGADILAN AGAMA.....</b> | <b>124</b> |
| 6.1. Dampak Normatif .....                                                                                                                          | 124        |
| 6.2. Dampak Pelaksanaan Aturan Pembagian Sebagian Gaji Kepada Mantan Istri dan Mantan Istri .....                                                   | 125        |
| 6.3. Implikasi Pembagian Gaji Suami Untuk Bekas Istri di Pengadilan Agama.....                                                                      | 132        |
| 6.4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian Gaji Suami Untuk Bekas Istri Pasca Perceraian.....                                             | 140        |
| 6.5. Pandangan Politik Hukum Islam Terhadap Pembagian Gaji Sumai Untuk Bekas Istri Pasca Perceraian.....                                            | 154        |
| 6.6. Persoalan Implementasi Pembagian Gaji Suami Untuk Bekas Istri Pasca Perceraian dan Solusinya .....                                             | 155        |
| <b>BAB VII PENUTUP.....</b>                                                                                                                         | <b>159</b> |
| 7.1. Kesimpulan .....                                                                                                                               | 159        |
| 7.2. Rekomendasi .....                                                                                                                              | 161        |
| 7.3. Implikasi .....                                                                                                                                | 162        |
| 7.4. Keterbatasan Studi .....                                                                                                                       | 162        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                         | <b>165</b> |